

Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat Tahun 2009 - 2019

Sisilia Maria Parinusa*, Danny E. Waimbo
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Papua

Article history

Received: September 16, 2020

Accepted: November 10, 2020

*Corresponding Author:

E-mail:

s.parinusa@unipa.ac.id

Abstract

The extent to which a region has developed can be measured from a decrease percentage of population living in poverty. Tambrauw Regency which is located in West Papua Province has the highest number of poor people after Pegunungan Arfak Regency. The aim of this research is to examine the social and economic factors that influence the level of poverty in Tambrauw Regency. The social indicator in this study is proxied by Human Development Index meanwhile government capital expenditure, economic growth and income per capita behave as the economic indicators. This research was performed by using a time series data during period 2009 – 2019 and quantitative approach, in particular Ordinary Least Square Method (OLS). The result highlight that Human Development Index, government capital expenditure, economic growth and income per capita have negative and significant effect on the percentage of poor community simultaneously. Furthermore, in partial estimation only economic growth which has negative and significant effect on poverty reduction.

Keywords: Poverty; Human development index; Government capital expenditure; Economic growth; Income per capita

Abstrak

Salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin. Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu Kabupaten di Papua Barat yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi setelah Kabupaten Pegunungan Arfak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana indikator sosial dan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Tambrauw. Adapun indikator sosial dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia sedangkan indikator ekonomi diukur dari belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menggunakan data time series selama tahun 2009 - 2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis multivariate regresi linier berganda dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil analisis, terlihat bahwa secara simultan IPM, belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin. Akan tetapi, jika dilihat secara parsial maka hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Kata kunci : Kemiskinan; IPM; Belanja modal pemerintah; Pertumbuhan ekonomi; Pendapatan perkapita

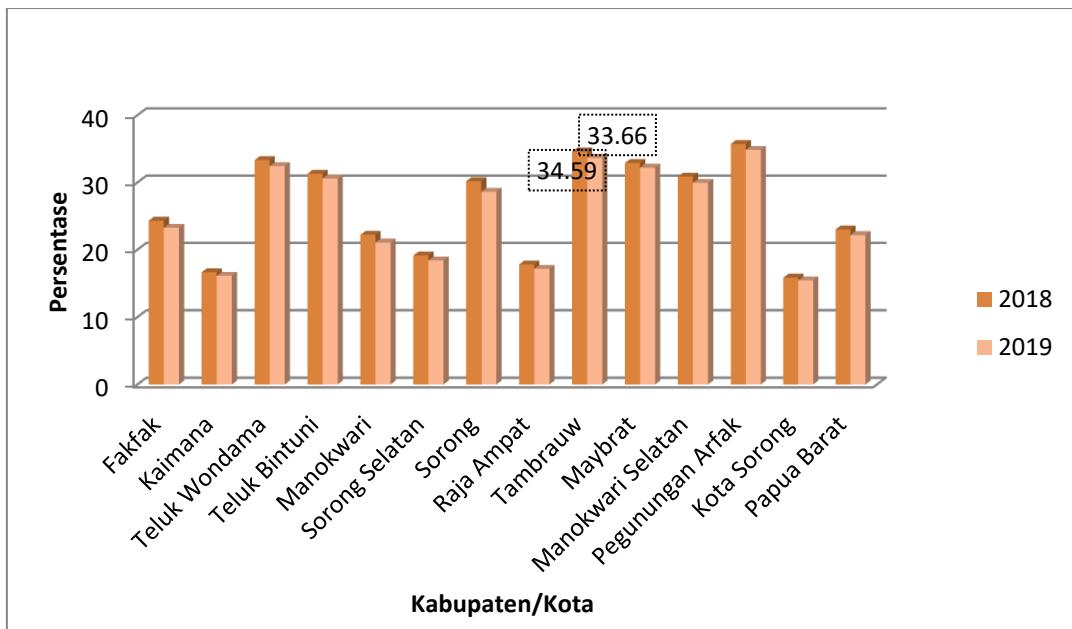
PENDAHULUAN

Tujuan utama dari usaha – usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi – tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pedapan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Todaro, 2000). Salah satu tolak ukur keberhasilan proses pembangunan di suatu wilayah dapat dilihat dari menurunnya jumlah penduduk miskin. Efektivitas dalam pengurangan jumlah penduduk miskin merupakan pertimbangan utama dalam menentukan strategi dan kebijakan pembangunan di suatu wilayah atau daerah.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata – rata nasional yang mencapai 9,22 persen dimana angka kemiskinan tertinggi terjadi di Papua dan Papua Barat. Di wilayah Papua Barat sendiri persentase penduduk miskin mencapai 21,51 persen. Kabupaten Tambrauw merupakan salah satu kabupaten yang ada di wilayah Papua Barat dan baru dibentuk pada tanggal 25 Januari 2009 dengan wilayah yang terdiri dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari dengan ibukota Fef. Walaupun telah menjadi Kabupaten sendiri namun selama beberapa tahun terakhir Kabupaten Tambrauw memiliki persentase penduduk miskin kedua tertinggi di Papua Barat setelah Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kemiskinan masih merajalela, dilihat dari ketergantungan penduduk terhadap kebijakan pemerintah daerah. Prioritas pemerintah terbukti pada infrastruktur jalan dan bangunan. Sayangnya sumber daya manusia asli Tambrauw belum mampu merespon dengan kualitasnya. Hal ini terkesan memberikan peluang keuntungan ekonomi para pendatang dibanding penduduk asli Tambrauw. Kios – kios milik pendatang lebih dominan dan menambah utang rumah tangga kecil di kampung – kampung. Yang ditakutkan adalah utang kios dibayar dengan tanah adat (Ajoi, 2019).

Grafik 1.1 memperlihatkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tambrauw adalah kedua yang tertinggi setelah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan jumlah persentase penduduk miskin mencapai 35,72 persen pada tahun 2018 dan 34,83 persen di tahun 2019. jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Papua Barat yaitu sebesar 34,59 persen pada tahun 2018 dan 33,66 persen pada tahun 2019.



Gambar 1.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018 – 2019

Sumber: BPS Provinsi Papua Barat, 2019.

Menurut Todaro (2006) pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi, namun yang perlu diperhatikan tidak hanya angka statistik yang memperlihatkan laju pertumbuhan, namun lebih kepada siapa yang menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut, apakah hanya segelintir orang atau sebagian besar masyarakat. Jika hanya segelintir orang yang menikmati maka pertumbuhan ekonomi tidak mampu mereduksi kemiskinan dan memperkecil ketimpangan, sebaliknya jika sebagian besar turut berpartisipasi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi maka kemiskinan dapat direduksi dan *gap* antara orang kaya dan miskin dapat diperkecil.

Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah ingin melihat sejauh mana pengaruh indikator sosial dan ekonomi terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Adapun indikator sosial dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sedangkan indikator – indikator ekonomi diukur dengan belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita.

Menurut teori pertumbuhan Adam Smith, masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya, pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja antar pelaku ekonomi. Dalam hal ini Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith, dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Dalam pembangunan ekonomi, modal

memegang peranan yang penting. Menurut teori ini, akumulasi modal akan menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal tersebut diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi modal yang dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil, dalam upaya untuk meningkatkan penerimaannya. Akumulasi modal dan investasi sangat bergantung pada perilaku menabung masyarakat, sementara di sisi lain kemampuan menabung masyarakat ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumberdaya yang ada. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain. Timbulnya peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi, dan memperluas pasar.

Adisasmita (2014) menulis ciri – ciri negara berkembang pada umumnya adalah merupakan negara agraris, struktur ekonominya berat sebelah pada sektor pertanian, memiliki jumlah penduduk banyak, berpendapatan (per kapita) relatif rendah, kemampuan sumberdaya manusianya rendah, produktivitas ekonominya rendah, pembentukan modalnya kurang meskipun memiliki kekayaan sumberdaya alam yang potensial, tetapi pembangunan di negara – negara berkembang menghadapi hambatan – hambatan struktural yang sangat berat, sehingga keadaan – keadaan negara – negara berkembang tetap melarat (miskin). Sebagian dari ciri – ciri tersebut merupakan penyebab, sekaligus sebagai akibat dari kemiskinan, yang sering disebut sebagai setan lingkar kemiskinan.

Lingkar setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) pada dasarnya berasal dari kenyataan yang menunjukkan bahwa produktivitas di negara – negara berkembang sangat rendah sebagai akibat dari kekurangan modal, pasar yang terbatas, dan keterbelakangan perekonomian. Lingkar setan tersebut bila ditinjau dari segi permintaan (*demand side*) dapat dijelaskan, yaitu rendahnya tingkat pendapatan riil menyebabkan tingkat permintaan menjadi rendah, yang selanjutnya menyebabkan tingkat investasi menjadi rendah. Tingkat investasi yang rendah selanjutnya akan kembali menyebabkan modal kurang dan produktivitas rendah. Demikianlah prosesnya akan berulang terus. Lingkar setan kemiskinan yang dilihat dari sudut penawaran (*supply side*) memperlihatkan bahwa produktivitas yang rendah disebabkan karena pendapatan riil yang rendah. Tingkat tabungan yang rendah menyebabkan tingkat investasi rendah dan pembentukan modal kurang, yang selanjutnya menyebabkan produktivitas rendah.

Sharp, et.al dalam Mudrajad Kuncoro (2006) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama , secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkar setan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ragnar Nurkse pada tahun 1953. .

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya salah satu penyebab kemiskinan adalah perbedaan kualitas sumberdaya manusia. *Human capital* mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap GDP. Kontribusi modal manusia amatlah penting di samping modal fisik, bahkan rendahnya penghasilan diukur dari ketidaksamaan pendidikan di suatu negara. Kebijakan pembangunan yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia masing – masing daerah hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah yang lain, termasuk dalam hal kinerja ekonominya. Strategi pembangunan di sebagian besar negara memprioritaskan pada pembangunan kualitas modal manusia dengan melakukan perbaikan sistem pendidikan dan support anggaran (subsidi) yang besar.

Menurut Sun'an dan Senuk (2015) pertumbuhan ekonomi tidak semata – semata ditentukan oleh akumulasi investasi kapital tetapi tidak kalah pentingnya juga investasi manusia. Investasi kapital dan investasi manusia relevan sebagai faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pembangunan modal manusia diyakini tidak hanya dapat meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan, namun juga berperan sentral mempengaruhi distribusi pendapatan di suatu perekonomian. Logika ini jugalah yang mendorong strategi pengentasan kemiskinan yang bersentral pada pentingnya pembangunan modal manusia (*human capital*).

Beberapa kajian empiris tentang kemiskinan telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya antara lain Novianto (2018) dalam studinya tentang “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah” dengan metode analisis data panel menunjukkan bahwa

pertumbuhan ekonomi, ipm, dan inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Sedangkan variabel pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya Kaligis (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening Variabel” dengan menggunakan analisis jalur menemukan bahwa belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan dan belanja modal secara langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian Azizah (2018) menemukan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kemiskinan Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Jika dibandingkan dengan studi – studi tentang kemiskinan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya di beberapa wilayah lainnya di Indonesia, perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya pengukuran pengaruh variabel belanja modal Pemerintah terhadap penurunan persentase penduduk miskin di Kabupaten Tambrauw bersama – sama dengan indikator ekonomi lainnya seperti pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sejak terbentuknya Kabupaten ini di tahun 2009. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program – program pembangunan yang telah dilakukan berdampak terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memasukkan indikator sosial yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ke dalam variabel pengukuran utk melihat apakah indikator sosial memiliki pengaruh terhadap pengurangan penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tambrauw.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data *time series*. Adapun data yang digunakan antara lain data persentase jumlah penduduk miskin, capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal Pemerintah Kabupaten Tambrauw, pendapatan perkapita penduduk Tambrauw dan pertumbuhan ekonomi dalam kurun waktu 11 tahun terakhir yaitu dari periode 2009 sampai dengan 2019. Selanjutnya, metode analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis *multivariate* regresi linier berganda dengan metode *Ordinary Least Square* (OLS) dengan memperlakukan persentase penduduk miskin sebagai variabel endogen sedangkan indeks pembangunan manusia (IPM), belanja modal pemerintah, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel

eksogen. Dengan demikian model yang akan digunakan dalam mengestimasi pengaruh indikator sosial dan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan adalah sebagai berikut :

dimana :

Y = Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tambrauw

$$\alpha = \text{intercept}$$

X₁ = Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tambrauw

X_2 = Belanja modal Pemerintah Kabupaten Tambrauw

X_3 = Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Tambrauw

X_4 = Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tambrauw

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dan data *time series* selama 11 tahun terakhir. Oleh karena itu uji asumsi klasik perlu dilakukan sebelum dilanjutkan dengan tahapan regresi.

A. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah residual yang dihasilkan oleh model analisis regresi berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, maka studi ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* dengan ketentuan residual dinyatakan normal apabila probabilitas dari Uji *Kolmogorov Smirnov* bernilai lebih besar dari level of significant ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan output SPSS, hasil pengujian menunjukkan bahwa tes statistik *Kolmogorov – Smirnov* adalah sebesar 0.169 dengan nilai signifikansi sebesar 0.200. Dengan demikian maka residual yang dihasilkan dinyatakan berdistribusi normal karena memiliki nilai signifikansi > 0.05 .

Setelah melakukan pengujian asumsi normalitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji asumsi multikolinieritas. Pengujian asumsi multikolinieritas dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel independen. Pada analisis regresi linier tidak diperbolehkan adanya hubungan antar variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) atau nilai *tolerance* dari masing – masing variabel independen.

Tabel 1. Hasil Pengujian Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
IPM	0.467	2.140
Belanja modal Pemerintah	0.396	2.527
Pertumbuhan Ekonomi	0.738	1.354
Pendapatan perkapita	0.252	3.961

Sumber : Hasil Analisis SPSS, 2020.

Berdasarkan hasil pengujian yang terdapat pada tabel di atas, terlihat bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* yang lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan bahwa analisis regresi pada penelitian ini dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinier.

Setelah melakukan uji asumsi multikolinieritas maka dilanjutkan dengan pengujian asumsi heteroskedastisitas. Asumsi ini digunakan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau tidak. Pengujian asumsi heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji glesjer yang hasilnya dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients <i>Beta</i>	t	.Sig
	B	Std Error			
(Constant)	2.363	8.688		0.272	0.795
IPM	0.104	0.227	0.239	0.458	0.663
Belanja Modal Pemerintah	0.004	0.003	0.584	1.028	0.344
Pertumbuhan Ekonomi	-0.292	0.393	-0.309	-0.744	0.485
Pendapatan perkapita	-0.624	0.638	-0.694	-0.977	0.366

Sumber : Hasil Analisis SPSS, 2020.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari uji glesjer terlihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh untuk semua variabel nilainya lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini. Selanjutnya, karena data yang digunakan dalam studi ini merupakan data time series maka perlu dilakukan uji autokorelasi untuk melihat apakah adanya korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Karena salah satu asumsi penting metode OLS berkaitan dengan variabel gangguan adalah tidak adanya hubungan antara variabel gangguan satu dengan variabel gangguan yang lain. Oleh karena itu dilakukan pengujian asumsi autokorelasi dilakukan dengan melakukan uji Durbin-Watson tetapi karena tidak memberikan kesimpulan yang pasti maka pengujian dilanjutkan lagi dengan melakukan *run test* dan berdasarkan

output *run test* diperoleh nilai *Asymp.Sig (2-tailed)* sebesar 0.977 dimana nilai ini lebih besar dari 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi pada model regresi yang digunakan pada penelitian ini.

B. Hasil Estimasi Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Belanja Modal Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw

Hasil pengujian pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tambrauw dapat dilihat pada melalui tabel berikut ini :

Tabel 3. Hasil Estimasi Pengaruh IPM, Belanja Modal Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Tambrauw

Variabel	Koefisien	Standardized Coefficient	tstatistic	Prob
Kontanta	90.848		4.502	0.004
IPM	-0.488	-0.228	-0.925	0.391
Belanja modal Pemerintah	-0.002	-0.081	-0.302	0.773
Pertumbuhan Ekonomi	-2.284	-0.490	-2.502	0.046
Pendapatan perkapita	-1.403	-0.317	-0.946	0.381
Fstatistic = 7.342	Prob = 0.017			
R-squared = 0.830	Adj R-squared = 0.717			

Sumber : Hasil Analisis SPSS, 2020.

1) Pengujian Koefisien Determinasi

Besarnya kontribusi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan dapat diketahui melalui koefisien determinasinya (*Adj R²*) yaitu sebesar 0.717. Hal ini menunjukkan bahwa keragaman tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh IPM, belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita sebesar 71.7 persen atau dengan kata lain kontribusi variabel IPM, belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan sebesar 71.7 persen sedangkan sisanya sebesar 28.3 persen merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

2) Pengujian Hipotesis

a. Uji Hipotesis Simultan

Pengujian hipotesis simultan digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh serempak IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita

terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pengujian hipotesis simultan dilakukan dengan uji statistik F yang menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2009). Kriteria pengujian menyatakan jika nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau probabilitas $< level\ of\ significance (\alpha)$ maka terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan. Pengujian hipotesis secara simultan menghasilkan nilai F_{hitung} sebesar 7.342 dengan probabilitas sebesar 0.017. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa nilai probabilitas yang diperoleh $0.017 < 0.05 (level\ of\ significance = \alpha)$. Hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan atau secara bersama-sama IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw.

b. Uji Hipotesis Parsial

Pengujian hipotesis parsial digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari masing – masing variabel eksogen dalam penelitian ini yaitu IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten Tambrauw. Menurut Ghozali (2009), uji statsistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel lainnya konstan. Kriteria pengujian menyatakan jika nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau probabilitas $< level\ of\ significance (\alpha)$ maka terdapat pengaruh signifikan secara individu IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita terhadap tingkat kemiskinan.

Pengujian hipotesis secara parsial IPM menghasilkan nilai t_{hitung} sebesar -0.925 dengan probabilitas sebesar 0.391. Output pengolahan data menunjukkan bahwa nilai probalitas yang diperoleh $> level\ of\ significance (\alpha = 5\%)$. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan IPM terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Selanjutnya untuk pengujian koefisien parsial dari belanja modal Pemerintah memperoleh nilai t_{hitung} sebesar -0.302 dengan nilai probabilitas 0.773. Nilai probabilitas yang lebih besar dari nilai $\alpha = 0.05$ memperlihatkan bahwa belanja modal Pemerintah juga tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Selanjutnya, untuk pengujian koefisien parsial dari variabel pertumbuhan ekonomi menghasilkan nilai t hitung sebesar -2.502 dengan nilai probabilitas 0.046. Nilai probabilitas yang diperoleh $0.046 < 0.05$ sehingga hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Sedangkan untuk pengujian hipotesis secara parsial variabel pendapatan perkapita memberikan hasil yang berbeda. Pengujian t statistik menghasilkan nilai t hitung -0.946 dengan nilai probabilitas 0.381 dimana nilai ini lebih besar dari nilai signifikansi 0.05. Dengan demikian variabel pendapatan perkapita tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw.

c. Model Empirik Regresi Linier Berganda

Persamaan regresi dari hasil estimasi analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tingkat Kemiskinan} = & 90.848 - 0.488 \text{ IPM} - 0.002 \text{ Belanja Modal Pemerintah} - 2.284 \\ & \text{Pertumbuhan Ekonomi} - 1.403 \text{ Pendapatan perkapita.} \end{aligned}$$

Persamaan ini mengandung arti bahwa konstanta sebesar 90.848 mengindikasikan jika IPM, belanja modal pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita bernilai konstan atau tidak berubah maka besarnya pengukuran tingkat kemiskinan adalah sebesar 90.848 persen. Sedangkan koefisien IPM sebesar - 0.488 mengandung arti bahwa variabel IPM berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, apabila terjadi peningkatan capaian kinerja IPM maka cenderung akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0.488 persen meskipun penurunan tersebut tidak signifikan. Selanjutnya koefisien belanja modal Pemerintah sebesar - 0.002 yang berarti bahwa variabel belanja modal Pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan belanja modal Pemerintah maka hanya akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar 0.002 persen dan penurunan tersebut tidak signifikan. Sebaliknya, untuk variabel pertumbuhan ekonomi memiliki koefisien sebesar - 2.284 yang menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi maka cenderung akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 2.284 persen. Sedangkan untuk variabel pendapatan perkapita memiliki koefisien sebesar -1.403 persen, hal ini memperlihatkan bahwa variabel pendapatan perkapita berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya apabila terjadi kenaikan pendapatan

perkapita maka cenderung akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1.403 persen meskipun penurunan tersebut tidak signifikan.

Selanjutnya, pengaruh dominan variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat melalui *standardized coefficient* yang paling besar. Berdasarkan hasil estimasi yang ditunjukkan pada tabel 3 di atas, dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki koefisien standardisasi terbesar adalah variabel pertumbuhan ekonomi dengan nilai – 0.490. Dengan demikian variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh yang paling besar atau paling dominan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi untuk variabel IPM, belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita adalah negatif. Temuan ini sudah sesuai dengan landasan teori dan studi empiris sebelumnya. Secara simultan keempat variabel eksogen ini berpengaruh secara bersama – sama terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Jika kondisi ini didasarkan pada teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dan teori lingkaran setan kemiskinan yang menyatakan pertumbuhan ekonomi, investasi modal fisik, kualitas sumber daya manusia dan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan, maka hasil yang diperoleh dalam studi ini tidak bertentangan dan masih sesuai dengan dasar teori yang digunakan.

Akan tetapi jika dilihat lebih jauh lagi, secara parsial hanya variabel pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan ketiga variabel lainnya yaitu IPM, belanja modal pemerintah dan pendapatan perkapita meskipun memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan terhadap penurunan persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tambrauw. Dengan kata lain, program – program yang dilakukan untuk memperbaiki IPM maupun sektor – sektor yang menjadi perhatian dari belanja modal Pemerintah dan pendapatan perkapita belum sepenuhnya menyentuh golongan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Tambrauw. Hasil temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2017) tentang Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Paat, Koleangan dan Rumate (2019) dalam studinya tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung” menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik di Kota Bitung. Sedangkan Romi dan Umiyati (2018) menemukan bahwa secara simultan pertumbuhan ekonomi dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kota Jambi. Akan tetapi secara parsial hanya upah minimum provinsi yang berpengaruh terhadap kemiskinan.

Variabel Indeks Pembangunan Manusia dalam penelitian ini secara parsial juga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin dalam kurun waktu 11 tahun terakhir artinya angka harapan hidup di wilayah Kabupaten Tambrauw belum sepenuhnya menyentuh golongan masyarakat miskin. Selain itu, pengaruh yang tidak signifikan dari variabel IPM juga menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan dan pendidikan selama periode tahun 2009 – 2019 hanya dinikmati oleh segelintir kelompok masyarakat yang bukan merupakan golongan masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang berpendapatan yang rendah. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil temuan Syaifullah dan Malik (2017) dalam studinya tentang Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN. Mereka menemukan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN dalam kurun waktu 2005-2014. Sedangkan Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Terkait dengan variabel belanja modal pemerintah, dalam studi yang dilakukan oleh Putro, Mintarti dan Wijaya (2017) menemukan bahwa variabel belanja modal Pemerintah, IPM, ketimpangan pendapatan / gini ratio secara bersama – sama berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel antara PDRB. Hasil temuan ini searah dengan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dimana belanja modal pemerintah bersama – sama dengan IPM, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengurangan persentase penduduk miskin. Akan tetapi secara parsial belanja modal pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tambrauw. Hal ini berarti bahwa investasi modal yang dilakukan Pemerintah selama 11 tahun terakhir tidak terlalu dirasakan dampaknya oleh golongan masyarakat miskin tetapi dinikmati oleh kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi.

Untuk pendapatan perkapita juga memiliki pengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin di wilayah Kabupaten Tambrauw selama periode 2009 – 2019. Hasil temuan ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan pendapatan perkapita selama 11 tahun terakhir tidak memberikan dampak pada penurunan persentase penduduk miskin. Artinya setiap terjadi peningkatan pendapatan perkapita persentase penduduk miskin tidak menurun dengan kata lain yang menikmati adanya peningkatan pendapatan perkapita adalah bukan golongan masyarakat miskin atau bukan kelompok masyarakat yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Frans, Rahayu dan Mahardika (2017) dalam studinya tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan per kapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan. Mereka menemukan bahwa dengan semakin tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan per kapita tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Barat selama tahun 2011 – 2015. Ini berarti bahwa dengan semakin tingginya PAD dan PDRB per kapita belum mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data selama 11 tahun terakhir dengan metode analisis regresi linier berganda dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belanja modal Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw. Akan tetapi apabila dilihat secara parsial maka hanya pertumbuhan ekonomi yang memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin, sedangkan IPM, belanja modal Pemerintah dan pendapatan perkapita meskipun memiliki pengaruh negatif tetapi tidak berdampak signifikan terhadap penurunan persentase penduduk miskin. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode 2009 – 2019 belanja modal Pemerintah, fasilitas pendidikan dan kesehatan, maupun peningkatan pendapatan per kapita belum dirasakan oleh golongan masyarakat miskin atau yang berpendapatan rendah di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Dengan mengacu pada hasil temuan dalam penelitian ini maka Pemerintah memiliki peran yang strategis dalam mengarahkan kebijakan dan program yang diuat ke arah kebijakan publik yang memihak kelompok masyarakat tidak mampu. Hal ini perlu dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat memperbaiki kualitas hidup kelompok masyarakat miskin. Oleh

karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi kemiskinan di wilayah Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut :

1. Variabel Indeks Pembangunan Manusia yang berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap persentase penduduk miskin mengindikasikan bahwa fasilitas kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat Tambrauw perlu ditingkatkan oleh Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan layanan pendidikan yang biayanya lebih murah atau membangun sekolah – sekolah yang dekat dengan kampung – kampung yang terpencil. Sehingga fasilitas pendidikan benar – benar dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang membutuhkan. Selanjutnya, terkait dengan fasilitas kesehatan, Pemerintah dapat menyediakan layanan kesehatan gratis bagi kelompok masyarakat yang mengalami kesulitan untuk mengakses fasilitas kesehatan atau membangun puskesmas dan menyediakan tenaga kesehatan yang dapat melayani di kampung – kampung yang terisolir.
2. Variabel belanja modal Pemerintah yang berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap pengurangan persentase penduduk miskin menunjukkan bahwa selama 11 tahun terakhir pembangunan sarana dan prasarana lebih dirasakan dampaknya untuk masyarakat yang bukan termasuk dalam golongan masyarakat miskin. Dengan demikian Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali program yang dapat benar – benar menyentuh kelompok masyarakat miskin. Misalnya pembuatan jalan yang bisa membantu membuka akses masyarakat yang ada di kampung – kampung terpencil atau penyediaan sarana transportasi publik yang dapat membantu masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi.
3. Variabel pendapatan per kapita berpengaruh negatif namun juga tidak signifikan terhadap jumlah persentase jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti bahwa peningkatan pendapatan per kapita dalam kurun waktu 11 tahun terakhir bukan dinikmati oleh golongan penduduk miskin. Sehingga Pemerintah perlu mempertimbangkan sektor –sektor perekonomian yang strategis yang dapat menyerap tenaga kerja dari golongan masyarakat miskin yang tidak membutuhkan keterampilan khusus atau pendidikan yang tinggi untuk bekerja, sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan mereka.
4. Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini berarti bahwa Pemerintah harus tetap dapat

meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi dengan menggerakkan sektor – sektor riil yang dapat menyediakan lapangan pekerjaan terutama kepada golongan masyarakat miskin, sehingga terjadi peningkatan pendapatan pada masyarakat yang berada di sekitar garis kemiskinan.

REFERENSI

- Adisasmita, R. 2014. Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Ajoi, K. 2019. Problematika Pembangunan di Lembah Kebar, Tambrauw Sebagai Daerah Otonomi Baru. <https://suarapapua.com/2019/12/12/problematika-pembangunan-di-lembah-kebar-tambrauw-sebagai-daerah-otonomi-baru/>. Diakses 28 Juni, 2020.
- Azizah, E.W., Sudarti, S. dan Kusuma, H. 2018. Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur. Jurnal Ilmu Ekonomi Vol. 2 No.1.
- Frans, D., Rahayu, S., dan Mahardika, D.P.K. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Perkapita, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Empiris pada Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 – 2015). E-Proceeding of Management : Vol. 4, No.2 Agustus 2017.
- Kaligis, E. 2017. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kemiskinan di Minahasa Utara Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Intervening Variabel. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.17, No.02.
- Kuncoro, M. 2006. Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan. Edisi Keempat. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Mustafa, A. 2020. Papua Masih Jadi Provinsi dengan Angka Kemiskinan Tertinggi. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200115174641-532-465658/papua-masih-jadi-provinsi-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi>. Diakses 17 Juni, 2020.
- Novianto,S. 2018. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Inflasi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Paat, D.C., Koleangan, R.A.M. dan Rumate, V.A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19, No.1.
- Purnama, N. I. 2017. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. Jurnal Ekonomikawan Vol.17, No.1.
- Putro, P.B.W., Mintarti, S. dan Wijaya. A. Analisis Determinasi Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. Inovasi - Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen Vol.13, No.2.
- Romi, S. dan Umiyati, E. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Kota Jambi. E-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah Vol.7, No.1.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sun'an, M. dan Senuk, A. 2015. Ekonomi Pembangunan Daerah. Penerbit Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Syaifulah, A. dan Malik, N. 2017. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan di ASEAN-4 (Studi Pada 4 Negara ASEAN). Jurnal Ilmu Ekonomi Vol.1, No.1.
- Todaro, M.P., 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi (Edisi Kesembilan Jilid 1). Penerbit Erlangga. Jakarta.